

# nawaja

Edisi 06, Vol. 09

Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia

## Jurnal Integritas :

- Ekosistem pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
- Pencegahan korupsi politik : Penerapan Sistem Integritas Partai Politik di Partai Kebangkitan Bangsa

## Koleksi Buku Bulan Ini :

- *Dibalik Krisis Ekosistem*
- *Dakon*
- *Media Sosial : Masa Depan Media Komunitas?*
- *Senja di Jakarta*
- *Revolusi Hijau Generasi Kedua : Etalase Pertanian Menuju Indonesia Organik*
- *Keluarga Kita : Mencintai dengan Lebih Baik*

Perpustakaan Gedung Merah Putih KPK  
Lt. 1, Jalan Kuningan Persada  
Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Perpustakaan Gedung Pusat Pelatihan Antikorupsi KPK  
Lt. 4, Jalan Haji R. Rasuna Said  
Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

# Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia

## Politik Hukum Pancasila

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, memiliki peran sentral membentuk karakter serta menentukan arah pembangunan nasional. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terdiri atas lima sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang diharapkan dapat diwujudkan dalam setiap kebijakan dan peraturan yang ada di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mampu mengakomodasi serta menyatukan keberagaman bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang harmonis. Menjadi pedoman dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan negara.

Pancasila erat kaitannya dengan politik hukum lingkup studi maupun praktik tentang bagaimana hukum dipengaruhi oleh dan mempengaruhi dinamika politik serta kebijakan pemerintah. Politik hukum tidak hanya terbatas pada pembuatan undang-undang, tetapi juga mencakup penegakan hukum dan interpretasi hukum oleh lembaga-lembaga negara. Mencakup bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, sosial, dan ekonomi. Politik hukum merupakan konsep yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan politik dan sosial dalam masyarakat. Politik hukum tidak dapat dipisahkan dari Pancasila, yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini Politik Hukum Pancasila mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk membangun negara yang demokratis, adil, dan sejahtera. Sebab itu, setiap kebijakan hukum yang dihasilkan harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Buku "Politik Hukum Pancasila" menyajikan analisis mendalam mengenai peran penting Pancasila dalam pembentukan dan pengembangan kebijakan hukum di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila



-memiliki dampak besar terhadap semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang hukum dan politik. Memberikan pandangan mengenai pancasila dalam memandu politik hukum Indonesia. Dilengkapi dengan berbagai penjelasan yang filosofis, pembaca perlu memahami berbagai istilah pada indeks sehingga memahami substansi secara komprehensif. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan pada buku ini, buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang tertarik dalam studi hukum, politik, dan kebijakan publik di Indonesia. Merupakan bacaan penting bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mendalami tentang Pancasila sebagai landasan hukum dan proses legislasi. Penasaran dengan isi buku ini? Segera temukan di Perpustakaan KPK!

Penulis : Dr. Daniel Yusmic P.F  
Penerbit : PT RajaGrafindo Persada  
Tahun Terbit : 2023  
Tebal Buku : 246

**Ekosistem pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri**

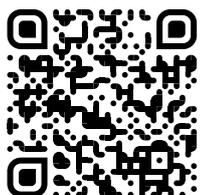
***Anticorruption education ecosystemsat State Islamic Universities in Indonesia***



Problem krisis korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf membahayakan dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, termasuk pendidikan tinggi. Kalau tidak diselesaikan secara serius, korupsi di Indonesia dapat membawa negara Indonesia menuju kehancuran. Studi ini memang hanya mengkaji tentang ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi keagamaan, tetapi studi ini terkait dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekosistem pendidikan antikorupsi di PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data diambil melalui angket dengan indikator (1) jaringan penciptaan nilai-nilai antikorupsi (*value-creating networks*); (2) sistem tata kelola yang bersih dan transparan (*a governance system*), dan (3) kesadaran kolektif perlunya gerakan untuk melawan korupsi (*shared logic*). Angket disebar melalui *google form* dengan responden para Wakil Rektor II (bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan) dan kepala SPI (Satuan Pengawas Internal) di PTKIN. Hasil penelitian ini membuktikan karakteristik ekosistem pendidikan di PTKIN cukup suportif bagi pendidikan antikorupsi, dengan skor rerata 3,4833 (kategori skor C). Meskipun cukup suportif, capaian tersebut masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang lebih tegas dan komitmen pimpinan PTKIN untuk membangun ekosistem pendidikan antikorupsi yang lebih baik.

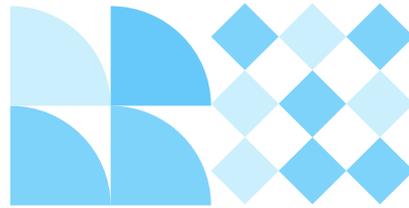
**Pencegahan korupsi politik:Penerapan Sistem Integritas Partai Politik di Partai Kebangkitan Bangsa**

***The prevention of political corruption and implementation of the Political Party Integrity System in Partai Kebangkitan Bangsa***



Fokus tulisan ini mengkaji pelembagaan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak pemilu 2009, 2014 dan 2019, perolehan suara PKB mengalami peningkatan. Jumlah kader partai yang terjerat kasus korupsi pun relatif sedikit dibandingkan dengan partai-partai lain. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana pelembagaan SIPP di PKB yang diinisiasi oleh KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik? Kerangka teori yang digunakan adalah teori pelembagaan O'Donnell. Terdapat dua tahap pelembagaan, yaitu penyebaran nilai (*value infusion*) dan tindakan rutin terhadap nilai-nilai tersebut (*behavioral routineization*). Data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelembagaan SIPP di PKB berlangsung melalui tahap penyebaran nilai-nilai SIPP. Penyebaran ini tertuang dalam Mabda' Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan Partai. Di dalamnya diatur mengenai kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, dan tata kelola keuangan.

# Koleksi Bulan Ini!



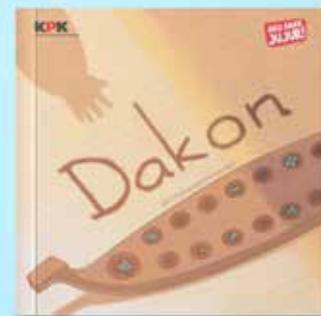
## Dibalik Krisis Ekosistem

Menyajikan isu-isu seputar krisis pengelolaan hutan dan Sumber Daya Alam. Menggali gagasan mengatasi permasalahan ekosistem di Indonesia.



## Dakon

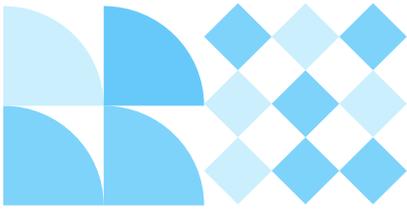
Didominasi oleh gambar, buku ini bercerita tentang Ela dan Aya yang bermain Dakon. Mengandung nilai budi pekerti tentang pentingnya tidak berbuat curang.



## Media Sosial: Masa Depan Media Komunitas?

Tulisan yang terangkum dalam buku ini menunjukkan bahwa media komunitas mampu bertahan bahkan berkembang di tengah pembatasan dan tekanan yang dialami.





### **Senja di Jakarta**

Bercerita tentang kemiskinan, korupsi, dan rentetan kejahatan yang mengalir deras di suatu kota namanya Jakarta. pada tahun 1950-an.



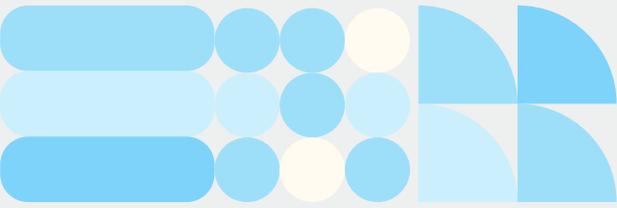
### **Revolusi Hijau Generasi Kedua: Etalase Pertanian Menuju Indonesia Organik**

Membahas tentang konsep dan penerapan revolusi hijau generasi kedua yang berfokus pada pertanian organik dan berkelanjutan di Indonesia.



### **Keluarga Kita: Mencintai dengan Lebih Baik**

Memberikan pedoman pengasuhan berdasar pengalaman sebagai orangtua yang dikurasi oleh pakar serta didasari riset dan praktik baik di bidang Pendidikan serta psikologi anak.



# nawaja

Edisi 06, Vol. 09

Yuk Berkunjung ke Perpustakaan KPK  
Scan untuk informasi lebih lanjut

